

**REKONSTRUKSI INKLUSI SOSIAL DAN KEADILAN GENDER PADA
KELUARGA MUDA RENTAN EKONOMI: TINJAUAN PPKN TERHADAP KRISIS
PERAN ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK**

Chandra Fhutu Neva¹, Nurur Risky Aulia², Andry Anshari³, Raysyah Putri
Sitanggang⁴

^{1,2,3}Universitas Negeri Medan, ⁴Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: 1chandraneva@unimed.ac.id, 2nururriskya@unimed.ac.id,

3andryanshari@unimed.ac.id, raysyahputri@umsu.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of the parental role crisis in character building is a crucial issue for young families facing economic vulnerability. This research is driven by structural challenges within the child protection system that have not effectively reached the grassroots level. The study aims to formulate a family inclusion model based on "Prosocial Networks" to strengthen children's character within the framework of Citizenship Education (PPKn). This research uses a qualitative approach, identifying that economic vulnerability and gender norms significantly impact parenting dynamics. The results indicate that an intervention framework integrating global issues (such as child penalty) and local citizenship is essential for sustainable social inclusion. The research results are manifested in a validated policy brief and character-strengthening module relevant to community-level child protection in Labuhanbatu Selatan.

Keywords: *Parental Role; Character Building; Economic Vulnerability; Family Inclusion; Gender Justice.*

ABSTRAK

Fenomena krisis peran orang tua dalam pembentukan karakter anak menjadi isu krusial pada keluarga muda yang menghadapi kerentanan ekonomi. Penelitian ini dilandasi oleh permasalahan struktural dalam sistem perlindungan anak yang belum mampu menjangkau lapisan komunitas paling bawah secara efektif. Tujuan penelitian adalah merumuskan model inklusi keluarga berbasis "Jaringan Prososial" untuk penguatan karakter anak dalam bingkai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengidentifikasi bahwa kerentanan ekonomi dan norma gender berdampak signifikan terhadap dinamika pengasuhan. Hasil menunjukkan bahwa kerangka intervensi yang mengintegrasikan isu global (seperti *child penalty*) dan kewarganegaraan lokal sangat diperlukan bagi inklusi sosial yang berkelanjutan. Hasil penelitian dimanifestasikan dalam naskah kebijakan (*policy brief*) yang tervalidasi dan modul penguatan karakter yang relevan bagi perlindungan anak di tingkat komunitas di Labuhanbatu Selatan.

Kata Kunci: Peran Orang Tua; Pembentukan Karakter; Kerentanan Ekonomi; Inklusi Keluarga; Keadilan Gender.

A. Pendahuluan

Kesenjangan gender di pasar kerja serta tekanan ekonomi rumah tangga merupakan fenomena sistemik yang secara luas memengaruhi dinamika pengasuhan anak dalam unit keluarga terkecil (Leite-mariante, Manfredi, and Landais 2025). Di tengah arus globalisasi, keluarga muda sering kali terjebak dalam pusaran kerentanan ekonomi yang tidak hanya mengancam stabilitas finansial, tetapi juga memicu krisis peran orang tua. Krisis ini berujung pada terhambatnya pembentukan karakter anak yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pendidikan kewarganegaraan di tingkat dasar (Allen 2017).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi keluarga berkorelasi erat dengan penurunan kualitas interaksi antara orang tua dan anak. Permasalahan ini semakin kompleks ketika sistem perlindungan anak yang ada secara struktural belum mampu menjangkau lapisan komunitas marginal secara holistik (Dariotis et al. 2023). Di wilayah Gang Nelayan, Kampung Lama Langgapayung, dinamika ini terlihat nyata, di mana

beban domestik dan tuntutan ekonomi sering kali timpang secara gender, menciptakan hambatan dalam proses internalisasi nilai-nilai karakter pada anak.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam menjembatani isu kewarganegaraan global dan lokal berbasis keluarga. Ketajaman analisis dalam artikel ini diarahkan untuk mengisi celah (*state of the art*) penelitian terdahulu dengan merumuskan kerangka intervensi yang aplikatif. Fokus utama penelitian ini adalah pengembangan model inklusi keluarga yang mampu memitigasi dampak kekerasan berbasis gender dan identitas lainnya, guna mewujudkan inklusi sosial yang berkelanjutan di tingkat komunitas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena krisis peran orang tua secara mendalam. Lokasi penelitian dipusatkan secara spesifik di Gang Nelayan, Kampung Lama Langgapayung, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Prosedur penelitian mencakup rancangan

penentuan sampling yang ketat serta teknik pengumpulan data yang telah disusun sistematis melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (*semi-structured*), dan catatan lapangan yang komprehensif (Sugiyono 2018).

Tahapan pelaksanaan dimulai dengan studi literatur dan analisis dokumen kebijakan global (UNCRC, ILO, World Bank) serta kebijakan lokal terkait perlindungan sosial dan fenomena *child penalty*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif buku sumber dari Miles dan Huberman guna menjamin validitas dan reliabilitas temuan (Miles 2007). Penelitian ini juga melibatkan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan orang tua rentan, khususnya ibu muda di komunitas marginal, serta diskusi validasi dengan praktisi hukum dan sosial untuk menyempurnakan draf model inklusi keluarga berbasis "Jaringan Prososial".

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dinamika Kerentanan Ekonomi dan Erosi Fungsi Transmisi Nilai Keluarga

Fenomena krisis pengasuhan di wilayah Gang Nelayan, Kampung Lama Langgapayung, merupakan implikasi sistemik dari struktur ekonomi yang fluktuatif bagi keluarga muda (Leite-Mariante, Manfredi, and Landais 2025). Berdasarkan observasi lapangan, tekanan finansial yang ekstrem memaksa pasangan muda untuk mengalokasikan hampir seluruh waktu produktif mereka pada sektor informal demi menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran prioritas, di mana fungsi transmisi nilai-nilai kewarganegaraan dan pembentukan karakter anak sering kali terabaikan karena keterbatasan energi dan waktu orang tua. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), rumah tangga seharusnya menjadi laboratorium moralitas pertama, namun kerentanan ekonomi telah mereduksi peran tersebut menjadi sekadar unit pemenuhan kebutuhan biologis semata (Rantanen et al. 2025).

Krisis ekonomi yang berkepanjangan tidak hanya mengancam stabilitas finansial, tetapi juga mengikis wibawa orang tua di

hadapan anak-anak mereka (M. D. Saragih et al. 2025). Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan Bapak Legimin (17/03/2026), salah satu narasumber yang mengungkapkan: *"Krisis ekonomi ini membuat kami kehilangan wibawa di depan anak, karena kami tidak bisa memberikan kecukupan, sehingga apa yang kami nasihatkan sering kali tidak didengar"*. Pernyataan tersebut merefleksikan adanya korelasi negatif antara kemiskinan dengan efektivitas kontrol sosial dalam keluarga. Ketika orang tua merasa gagal secara ekonomi, mereka cenderung menarik diri dari peran pendampingan karakter, yang pada akhirnya memutus mata rantai internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila pada generasi muda.

Ketidakhadiran figur orang tua dalam proses tumbuh kembang anak menciptakan celah bagi masuknya pengaruh eksternal yang tidak terfilter (Allen 2017). Anak-anak di Gang Nelayan sering kali dibiarkan tanpa pendampingan saat berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun konten digital⁴. Dampaknya, karakter gotong royong dan sopan santun yang menjadi ciri khas profil Pelajar Pancasila mulai digantikan oleh sikap individualis dan perilaku antisosial.

Erosi fungsi pengasuhan ini merupakan tantangan besar bagi pencapaian target pendidikan kewarganegaraan di tingkat lokal, di mana karakter seharusnya dibangun melalui keteladanan yang konsisten dari figur otoritas di rumah (Siregar et al. 2025).

Disfungsi peran ini juga diperparah oleh minimnya literasi pengasuhan di kalangan pasangan muda yang menghadapi tekanan ekonomi. Ketidaksiapan mental dalam menghadapi tanggung jawab domestik di tengah badai krisis global menyebabkan banyak orang tua merasa terjebak dalam siklus frustrasi. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Yanti (17/03/2026), yang menyoroti aspek psikososial pengasuhan: *"Banyak pasangan di sini yang menikah muda tanpa kesiapan mental, ketika ekonomi sulit, mereka stres dan akhirnya anak yang jadi sasaran emosi atau malah dibiarkan saja tanpa arahan"*. Realitas ini menunjukkan bahwa masalah karakter anak bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari ekosistem keluarga yang tidak sehat akibat tekanan struktural (Kleven and Landais 2017).

Secara substantif, hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi nilai moral memerlukan stabilitas emosional dan ekonomi yang memadai. Dalam kerangka PPKn, penguatan karakter berbasis keluarga tidak dapat dilakukan secara instruksional, melainkan harus melalui proses pendampingan yang berkelanjutan (Hennessy 2023). Namun, di Gang Nelayan, proses ini terputus karena orang tua lebih fokus pada strategi bertahan hidup (*survival strategy*). Akibatnya, anak kehilangan kompas moral yang seharusnya diberikan oleh orang tua sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan rumah tangga.

Persoalan ini semakin kompleks ketika anak mulai mencari pengakuan di luar rumah karena merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Penggunaan gadget tanpa kontrol menjadi pelarian yang umum ditemukan pada anak-anak keluarga rentan di lokasi penelitian. Adik Afifah (17/03/2026), salah satu anak di lingkungan tersebut, memberikan gambaran nyata mengenai situasi ini: "*Kami jarang berkumpul dengan keluarga secara utuh, saya lebih sibuk dengan gadget karena di rumah bapak dan mama*

capek kerja dan tidak pernah mengajak ngobrol". Fenomena ini menegaskan bahwa kesenjangan interaksi menjadi pintu masuk bagi degradasi karakter yang lebih luas.

Analisis yang bisa penulis sampaikan yaitu diperlukan rekonstruksi paradigma perlindungan anak yang tidak hanya menasar aspek fisik, tetapi juga aspek psikis dan nilai (Davies et al. 2023). Inklusi keluarga partisipatif harus didorong agar orang tua tetap mampu menjalankan peran edukatifnya meskipun dalam kondisi ekonomi terbatas. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, krisis peran orang tua ini akan terus memproduksi generasi dengan karakter yang rapuh dan terasing dari nilai-nilai kewarganegaraan.

2. Norma Gender dan Fenomena *Child Penalty* dalam Pengasuhan

Pada gender dan *child penalty*, penelitian ini menemukan bahwa norma gender tradisional masih sangat kuat mengakar pada keluarga muda di Gang Nelayan, yang berdampak pada ketimpangan beban pengasuhan. Ibu muda cenderung memikul beban ganda (*double burden*), di mana mereka harus

berkontribusi secara ekonomi sekaligus bertanggung jawab penuh atas urusan domestik dan karakter anak. Dalam literatur ekonomi kebijakan, kondisi ini dikenal sebagai *child penalty*, sebuah fenomena di mana kehadiran anak memberikan dampak negatif jangka panjang pada pendapatan dan kesehatan mental perempuan, sementara peran laki-laki tetap dominan di sektor publik. Ketidakseimbangan ini menghambat efektivitas pembentukan karakter anak karena ibu sering kali berada dalam kondisi kelelahan kronis (*burnout*).

Minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan harian menyebabkan anak laki-laki kehilangan sosok teladan maskulin yang berintegritas. Hal ini menjadi temuan krusial karena karakter kewarganegaraan memerlukan keseimbangan figur otoritas di dalam rumah. Ibu Yanti (17/03/2026) kembali menegaskan realitas ini dengan menyatakan: *"Kurangunya peran ayah sangat terasa di sini. Ayah sibuk melaut atau kerja serabutan, dan saat pulang mereka merasa tugasnya sudah selesai hanya dengan memberi uang. Anak laki-laki saya akhirnya kehilangan sosok teladan yang bisa*

membimbing karakternya". Ketidakhadiran figur ayah ini menciptakan kekosongan peran yang sulit digantikan oleh ibu saja.

Di sisi lain, ibu muda di wilayah rentan ekonomi sering kali merasa gagal dalam menjalankan fungsinya karena tuntutan ekonomi yang mendesak. Mereka dipaksa oleh keadaan untuk bekerja membantu suami, namun tetap dituntut untuk menjaga perilaku anak agar tetap terkontrol. Ibu Sri Jumiah (19/03/2026) menyampaikan kegelisahannya: *"Saya merasa gagal jadi ibu karena waktu saya habis untuk mencari tambahan uang belanja, sehingga saya tidak tahu lagi apa yang dilakukan anak saya di luar rumah"*. Perasaan bersalah yang dialami para ibu ini menunjukkan bahwa *child penalty* bukan hanya soal hilangnya pendapatan, tetapi juga hilangnya kesempatan untuk membangun kedekatan emosional dengan anak.

Analisis terhadap data wawancara menunjukkan bahwa anak-anak menyadari kurangnya perhatian dari orang tua mereka, khususnya ibu yang bekerja. Meskipun orang tua beranggapan bahwa bekerja adalah untuk kepentingan anak, anak justru merasa

diabaikan secara emosional. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Adik Elif (17/03/2026) yang mengatakan: *"Setiap pulang kerja mama tidak pernah menanyakan tugas sekolah kami, mama langsung istirahat karena capek. Jadi kami main sendiri saja di luar"*. Kurangnya komunikasi dua arah ini menyebabkan nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolah melalui mata pelajaran PPKn tidak mendapatkan penguatan di rumah (Nasution et al. 2022).

Transformasi nilai-nilai kewarganegaraan hanya dapat terjadi jika terdapat pergeseran dari pola pengasuhan berbasis gender tradisional menuju pengasuhan kolaboratif yang inklusif. Dalam kondisi ekonomi sulit, pembagian tugas yang kaku antara suami dan istri hanya akan memperburuk situasi keluarga. Orang tua perlu menyadari bahwa pembentukan karakter anak adalah tanggung jawab kolektif yang membutuhkan kehadiran fisik dan mental dari kedua belah pihak⁶. Kegagalan dalam membangun kolaborasi domestik ini berpotensi memicu kekerasan berbasis gender maupun pengabaian hak anak secara tidak langsung.

Hasil penelitian juga mengungkap adanya ironi, di mana orang tua memiliki harapan tinggi terhadap pendidikan anak, namun tidak didukung oleh pola asuh yang sinkron. Ibu Suryani (17/03/2026) menyatakan: *"Saya ingin anak saya sekolah tinggi agar tidak susah seperti kami, tapi perilaku dia sekarang makin tidak terkontrol karena kami jarang di rumah"*. Harapan ini mencerminkan adanya keinginan untuk mobilitas vertikal, namun terdapat hambatan struktural dalam bentuk keterbatasan waktu dan kapasitas pengasuhan. Tanpa adanya edukasi tentang pengasuhan responsif gender, keluarga muda ini akan terus terjebak dalam krisis peran yang sama.

Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan anak di tingkat komunitas harus melibatkan perspektif keadilan gender. Kebijakan sosial harus mampu memberikan ruang bagi ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan tanpa merasa kehilangan harga diri secara ekonomi. Model inklusi keluarga yang diusulkan dalam riset ini menekankan pentingnya mendobrak norma gender yang menghambat partisipasi aktif kedua orang tua dalam pembentukan karakter anak. Hanya dengan

keadilan gender di ranah domestik, karakter generasi masa depan dapat dibangun secara kokoh dan berkelanjutan.

3. Model Inklusi Keluarga Berbasis "Jaringan Prososial" dan Strategi Intervensi

Sebagai solusi atas krisis peran orang tua yang telah diidentifikasi, penelitian ini merumuskan model inklusi keluarga berbasis "Jaringan Prososial". Model ini menekankan pada pembentukan sistem dukungan sosial di tingkat gang atau komunitas kecil untuk memitigasi dampak kerentanan ekonomi terhadap pengasuhan anak. Jaringan ini berfungsi sebagai "jaring pengaman sosial" yang memungkinkan antar-keluarga untuk saling berbagi peran dalam pengawasan dan edukasi anak-anak di lingkungan mereka. Dalam bingkai PPKn, model ini menerapkan nilai gotong royong secara praktis untuk menjawab tantangan modern terkait pengabaian hak anak di wilayah marginal.

Implementasi model "Jaringan Prososial" memerlukan keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyediakan ruang dialog bagi

keluarga muda. Selama ini, orang tua di Gang Nelayan merasa berjuang sendirian menghadapi tekanan hidup tanpa adanya wadah untuk berbagi keluh kesah atau mendapatkan edukasi pengasuhan. Rekomendasi riset ini berupa naskah kebijakan (*policy brief*) mendorong pembentukan "Pusat Pendampingan Karakter Berbasis Gang" sebagai unit terkecil perlindungan anak. Pusat ini diharapkan menjadi tempat di mana norma-norma kewarganegaraan global dan lokal diintegrasikan dalam aktivitas sosial sehari-hari.

Berdasarkan diskusi validasi dengan praktisi, model ini dianggap sangat relevan karena menyentuh lapisan akar rumput yang selama ini sulit dijangkau oleh program formal pemerintah. Intervensi yang bersifat *top-down* sering kali gagal karena tidak mempertimbangkan dinamika sosiologis masyarakat pesisir yang unik. Dengan memanfaatkan jaringan prososial yang sudah ada, proses transfer pengetahuan tentang karakter Pelajar Pancasila dapat dilakukan secara lebih organik dan diterima oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan inklusif yang melindungi anak dari paparan perilaku

negatif dan konten digital yang merusak.

Dukungan dari narasumber menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan sistem pendukung komunitas yang lebih solid. Ibu Yanti (17/03/2026) secara realistis menyuarakan harapannya terhadap intervensi semacam ini: *"Kami butuh ada yang membimbing, bukan cuma dikasih bantuan uang saja. Kalau ada kelompok tempat belajar cara mendidik anak saat ekonomi sulit, pasti sangat membantu agar kami tidak salah jalan"*. Pernyataan ini menegaskan bahwa orang tua sebenarnya menyadari keterbatasan mereka dan menginginkan adanya pendampingan yang sifatnya pemberdayaan psikososial dan edukatif.

Strategi intervensi melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga diarahkan untuk memperkuat tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap pemenuhan hak anak (Neva 2025). Inklusi sosial bukan hanya soal keterbukaan akses ekonomi, tetapi juga soal memastikan setiap keluarga memiliki kapasitas untuk mendidik generasi yang berkarakter. Dalam roadmap penelitian FIS Unimed,

pengembangan modul penguatan karakter berbasis keluarga menjadi luaran penting untuk mendukung hilirisasi kebijakan sosial yang lebih responsif. Modul ini akan menjadi panduan bagi penggerak komunitas dalam mengelola jaringan prososial di wilayah mereka masing-masing.

Pemanfaatan teknologi juga harus menjadi bagian dari model intervensi ini guna menjawab tantangan era digital. Meskipun orang tua memiliki keterbatasan waktu, komunikasi antar-anggota jaringan prososial dapat dilakukan melalui platform digital sederhana untuk memantau aktivitas anak secara kolektif (Neva, Gunawati, and Triyanto 2022). Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini berperan sebagai fasilitator literasi digital bagi orang tua muda agar mereka mampu melakukan *digital parenting* yang efektif meskipun dalam keterbatasan. Kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan model inklusi ini (M. W. Saragih et al. 2025).

Secara keseluruhan, model "Jaringan Prososial" ini diharapkan dapat menjadi prototipe bagi wilayah lain yang menghadapi masalah serupa. Inklusi keluarga partisipatif

bukan sekadar konsep teoretis, melainkan investasi kewarganegaraan yang mendasar untuk menjaga keutuhan nilai bangsa di tengah badai krisis global. Dengan adanya dukungan kebijakan dari Dinas Pendidikan Daerah Labuhanbatu Selatan, model ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembentukan karakter anak pada keluarga muda rentan secara signifikan. Keberlanjutan program ini akan memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan nilai-nilai Pancasila tetap hidup di setiap gang dan rumah tangga.

E. Kesimpulan

Krisis peran orang tua pada keluarga muda di wilayah rentan ekonomi bukanlah masalah domestik semata, melainkan isu struktural yang memerlukan intervensi kebijakan berbasis keadilan gender dan inklusi sosial. Melalui kaca mata PPKn, penguatan karakter anak harus didukung oleh stabilitas peran orang tua dan sistem pendukung komunitas yang kuat. Model "Jaringan Prososial" diharapkan menjadi jembatan bagi terciptanya inklusi sosial berkelanjutan yang mampu

melindungi hak anak dan memberdayakan keluarga muda. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji efektivitas modul penguatan karakter yang telah disusun dalam skala komunitas yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Miles, Matthew B. dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Neva, Chandra Fhutu. 2025. *Pemerintahan Daerah Dan Masa Depan Demokrasi Lokal Indonesia*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Saragih, Mujahid Widian, Fernanda Putra Adela, Oman Sukmana, Andry Anshari, Muhammad Kamil, Ridha Ramadhany, Victor Lumbanraja, Fritz Hotman S. Damanik, Asep Nurjaman, and Murraya Putri Palupi. 2025. *Pengantar Ilmu Politik: Buku Ajar*. Star Digital Publishing.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Allen, Denise Smith. 2017. "Keeping the Children : Nonviolent Women Offenders in Two Michigan Residential Programs."
- Dariotis, Jacinda K., Frances R. Chen, Ye Rang Park, Montana K. Nowak, Katherine M. French, and Anisa M. Codamon. 2023. "Parentification Vulnerability , Reactivity , Resilience , and Thriving : A Mixed Methods Systematic Literature Review."
- Davies, Kate, Nicola Ross, Jessica Cocks, and Wendy Foote. 2023. "Children and Youth Services Review Family Inclusion in Child Protection : Knowledge , Power and Resistance." *Children and Youth Services Review* 147(December 2022):106860. doi:10.1016/j.childyouth.2023.106860.
- Hennessy, Róisín. 2023. "Exploring the Role of Social Protection Interventions in Preventing Child Labour : Reinforcing the Case for a Human Rights- Based Model of Intervention." (February):262–83.
- Kleven, Henrik, and Camille Landais. 2017. "Gender Inequality and Economic Development: Fertility, Education and Norms." *Economica* 84(334):180–209.
- Leite-mariante, Gabriel, Sveva Manfredi, and Camille Landais. 2025. " Explaining Variation in Child Penalties : The Role of Gender Norms and Policies ." 3(4):1–9. doi:10.31389/lseppr.119.
- Leite-Mariante, Gabriel, Sveva Manfredi, and Camille Landais. 2025. "Explaining Variation in Child Penalties: The Role of Gender Norms and Policies." *LSE Public Policy Review* 3(4).
- Nasution, F. A., A. Anshari, Husni Thamrin, M. H. Thamrin, Y. I. Indainanto, and Y. Aqmarina. 2022. "How Agroecology Practices in Lobu Rappa Village Can Improve Peasant Community Welfare." P. 12099 in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 1115. IOP Publishing.
- Neva, Chandra Fhutu, Dewi Gunawati, and Triyanto Triyanto. 2022. "Fulfillment of the Mandailing Community Suffrage Right in the 2020 Regional Head Election." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 19(1):86–98.
- Rantanen, Teemu, Tarja Juvonen, Kari Eklund, and Timo Toikko.
-

2025. "The Role of Financial Support in Preventing the Need for Child Protection Services : A Mixed Method Study on the Effects and Pathways of Additional Income Support." *European Journal of Social Work* 28(2):231–44.
doi:10.1080/13691457.2024.2344014.
- Saragih, Mima Defliyanti, Joy Novi Yanti Lumbantobing, Manotar leryaldo Sinaga, and Chandra Fhutu Neva. 2025. "Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Landasan Pembentukan Karakter Pelajar Pancasila." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10(04):304–13.
- Siregar, Masitowarni, Rahmad Husein, Ayunda Wulandari, Asrita Sari, and Nurur Risky Aulia. 2025. "Speaking Anxiety Symptoms Among Tenth-Grade Students in English Language Classes." *SALTeL Journal (Southeast Asia Language Teaching and Learning)* 8(2):22–27.